OMBUDSMAN TERJUNKAN TIM

Kamis, 19 Juli 2018 - Indra

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menelaah lebih dalam surat terbuka Nathalie Nathalie berjudul "Premanisme di Bandara Ahmad Yani Semarang" yang dimuat di laman Facebook tertanggal 15 Juli 2018 pukul 18.43. Terkait ada tidaknya pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Hal tersebut ditegaskan oleh Komisioner KPPU, Guntur Saragih kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (17/7) tadi malam. "Memang belum ada laporan yang masuk ke kami. Namun karena itu surat terbuka, kami akan menelaah terlebih dahulu ada tidaknya persaingan usaha," kata Guntur.

Tidak hanya terkait persaingan usaha yang menjadi ranah KPPU, lanjut Guntur, keluhan Nathalie tersebut juga bisa masuk ke ranah UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 2009. "Makanya perlu dikaji lebih dalam," tandasnya.

Hasil kajian tersebut, akan menghasilkan produk hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Sebagaimana yang telah dilakukan KPPU pada 2011 silam terkait monopoli usaha taksi bandara di Bandara Juanda Surabaya. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) menguatkan keputusan KPPU tentang sistem operasional taksi di Bandara Juanda, Surabaya. Bahwa PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Juanda dan Primer Koperasi Angkatan Laut Surabaya harus membuka kesempatan kepada operator taksi lainnya yang telah memiliki izin untuk bisa beroperasi di Bandara Juanda.

Tak hanya di Bandara Juanda, KPPU juga menelaah monopoli taksi bandara di Jakarta, Batam dan daerah lain. "Makanya, kami saat ini tidak bisa memberikan komentar tentang keluhan di Bandara Ahmad Yani tersebut (keluhan Nathalie di Facebook, Red). Kami harus mempelajari apakah kaitan keluhan tersebut masuk ke ranah kompetensi absolut kami sebagaimana termaktub dalam UU atau tidak. Pastinya, kami akan menelaah lebih lanjut," tandasnya.

Perlaksana Harian (Plh) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng, Sabaradin Hulu menegaskan, pihaknya mulai Rabu (18/7) ini hingga seminggu ke depan langsung menurunkan tim untuk melakukan investigasi di lapangan terkait keluhan Nathalie di laman Facebook.

"Kami akan melihat lebih jauh tentang pelayanan publik dan pengawasan yang dilakukan Angkasa Pura dalam menertibkan dan memberikan pelayanan moda transportasi di bandara kepada konsumen," jelasnya.

Jika ada pelayanan yang tak sebagaimana semestinya, katanya, misalnya tarif yang memberatkan atau membatasi kebebasan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi di bandara, Ombudsman akan mengkajinya.

"Kami juga mendorong aparat yang ada di Bandara Ahmad Yani untuk bekerjasama dengan pihak pengelola bandara sebagaimana mestinya. Sehingga penumpang di Bandara Ahmad Yani merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan yang baik, mulai datang hingga menuju tujuan di Semarang maupun selama keberangkatan hingga meninggalkan bandara," tandasnya.

Intinya, kata Sabarudin, yang disorot Ombudsman adalah pengawasan dan penertiban yang dilakukan PT Angkasa Pura. Makanya, investigasinya mengenai dugaan maladministrasi tentang pengawasan dan penertiban di Bandara Ahmad Yani. "Semua langkah ini, sudah kami diskusikan dalam rapat internal. Kami juga sudah mengumpulkan pemberitaan di media massa dan media sosial terkait yang ditulis Nathalie," tuturnya.

Sabarudin juga menyatakan bahwa Nathalie bisa melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum. Namun Nathalie lebih memilih sikap aman, tapi tetap mengharapkan ada perubahan di bandara.

"Harapan kami, Bandara Ahmad Yani yang baru ini, benar-benar bisa memberikan pelayanan keselamatan kepada masyarakat dalam menggunakan moda transportasi," harapnya.

Terpisah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi segera berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura terkait polemik operasional taksi di Bandara Ahmad Yani. Meski tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan, namun pihaknya akan memberi masukan kepada Angkasa Pura untuk mempertimbangkan mengubah kebijakan yang selama ini diberlakukan. Di mana taksi dari luar tidak boleh masuk atau mengangkut penumpang di di area bandara.

"Pemkot saat ini baru bisa sebatas imbauan. Karena pengelolaan parkir bandara jadi kewenangan Angkasa Pura," kata Hendi, sapaan akrabnya.

Menurut Hendi, seharusnya penumpang bisa memilih angkutan sesuai keinginan dan kenyamanannya. Apalagi Pemkot Semarang tengah gencar mempromosikan destinasi wisata, sehingga butuh pelayanan ramah bagi tamu atau pengunjung.

Hendi tidak ingin pelayanan publik yang ada di Kota Semarang, termasuk bandara menimbulkan kesan yang tidak baik gara-gara oknum tertentu. "Saat ini eranya berbagi dan tumbuh kembang bersama, supaya Semarang menjadi kota yang semakin banyak dikunjungi wisatawan," tandasnya.